

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memberikan dasar hukum bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. Melalui Pasal 68 dan 69, instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel, dengan menekankan pada produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk mendukung pengelolaan yang fleksibel ini, dibentuklah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), yang merupakan konsep baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rumah sakit, sebagai salah satu bentuk Badan Layanan Umum (BLU), memiliki karakteristik unik karena menggabungkan fungsi bisnis dan misi sosial dalam pelayanan medis. Karakteristik ini memberikan keleluasaan bagi rumah sakit dalam menyelenggarakan layanan kesehatan yang bermutu serta mampu merespons kebutuhan masyarakat secara optimal, sebagaimana diungkapkan dalam penelitian tentang Persepsi Mutu Pelayanan Kesehatan (Agustiningsih dan Andriani, 2024). Namun, di balik fleksibilitas dan misi sosial yang diemban, rumah sakit pemerintah tetap menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional dalam menjalankan tugas pelayanannya.



Rumah sakit pemerintah, yang lebih tepat diklasifikasikan sebagai organisasi non-bisnis karena tidak berorientasi pada profit, menghadapi berbagai tantangan. Tuntutan untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, biaya yang terjangkau, tenaga medis profesional, dan peralatan teknologi canggih menjadi beban yang berat. Selain itu, keterbatasan anggaran operasional, prosedur birokrasi yang kompleks dalam pencairan dana, serta kesulitan dalam mengukur kinerja menambah kompleksitas pengelolaan rumah sakit pemerintah. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan layanan kesehatan masyarakat (Priastuti dan Masdjojo, 2017). Sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan pengelolaan keuangan melalui penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) pada sejumlah rumah sakit pemerintah.

Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Kendari secara resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/KMK.05/2016, tertanggal 13 Januari 2016. Penunjukan ini memberikan keleluasaan bagi rumah sakit dalam mengelola keuangannya secara lebih fleksibel, memungkinkan rumah sakit untuk mengelola pendapatan dan belanja secara lebih mandiri guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Harapannya, Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dapat meningkatkan aset serta kualitas pelayanannya dengan status BLU, sejalan dengan Peraturan Pemerintah

3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.



Terdapat tuntutan dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi seiring dengan kebebasan pengelolaan keuangan yang diberikan oleh status BLU. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan ini secara khusus mengatur penggunaan basis akrual dalam pencatatan transaksi keuangan pemerintah. Dengan penerapan basis akrual, laporan keuangan rumah sakit sebagai satuan kerja pemerintah yang berstatus BLU menjadi lebih transparan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sesungguhnya karena memungkinkan pengakuan pendapatan, belanja, aset, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi, tidak terbatas pada saat kas diterima atau dibayarkan. Ini penting untuk menunjang pengambilan keputusan yang lebih akurat dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan rumah sakit, terutama dalam perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengendalian internal (Rahayu *et al.*, 2023).

Penerapan basis akrual dan status BLU ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efisien dan akuntabel. Menurut Djuhaeni (2006) perubahan dalam sistem keuangan baik di tingkat rumah sakit maupun dalam sistem keuangan pemerintah secara umum, diharapkan dapat mendorong peningkatan dalam pengelolaan dana oleh rumah sakit, seiring dengan bertambahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta persiapan menuju status Badan Layanan Umum dari tahun ke tahun. Meskipun situasi ini mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas layanan, namun juga mempunyai

risiko untuk menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan, seperti masalah pengelolaan keuangan negara.



Oleh karena itu, diperlukan berbagai langkah strategis untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut. Rumah sakit perlu didukung oleh sistem pengelolaan keuangan yang bersifat otonom, transparan, fleksibel, dan akuntabel agar kegiatan operasional dapat berjalan secara optimal dan berdampak pada peningkatan kualitas layanan serta kepuasan pasien (Vlasiadis *et al.*, 2022). Hal ini sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 129/PMK.05/2020 yang menjelaskan bahwa tujuan dari penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yaitu mendorong peningkatan kinerja pelayanan publik, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, serta mewujudkan tata kelola yang baik.

Tabel 1.1 Perbandingan Satuan Kerja Non BLU dengan Satuan Kerja yang Telah Berstatus Sebagai BLU

Uraian	Satker Non BLU	Satker BLU
Pendapatan	Disetor Langsung ke Kas Daerah	Dapat Digunakan Langsung
Laporan Keuangan	Disusun berdasarkan SAP	Disusun berdasarkan SAP
Pengeluaran Anggaran	Setelah DIPA disahkan	Dapat dilakukan sebelum DIPA disahkan
Tarif Layanan	Berdasarkan prinsip adil dan patuh	Berdasarkan perhitungan biaya per unit layanan
Piutang/Utang	Tidak Diperbolehkan Melakukan Piutang/Utang	Diperbolehkan Melakukan Piutang/Utang
Dokumen Penganggaran	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)	Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)
Audit Laporan Keuangan	Oleh BPK	Oleh auditor independen
Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada Keppres/Perpres	Dapat menyusun pedoman sendiri
ai	Seluruhnya PNS/ASN	Dapat merekrut tenaga profesional non-PNS selain PNS dan kontrak

: PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum



Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menyajikan perbandingan antara satuan kerja non-BLU dan satuan kerja yang telah berstatus BLU dalam hal fleksibilitas yang diberikan kepada rumah sakit. Adanya perubahan ini diharapkan mampu berdampak positif terhadap kinerja keuangan rumah sakit, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas layanan di rumah sakit.

Dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan, penting bagi rumah sakit untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya internal ataupun eksternal. Sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitar juga seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal guna mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan rencana kegiatan operasional rumah sakit. Oleh karena itu, penilaian terhadap kinerja keuangan menjadi suatu proses yang sangat penting. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengetahui sejauh mana efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan keberlanjutan dan daya saing rumah sakit di masa mendatang (Ait Jillali & Belkassheh, 2022).

Beberapa penelitian telah membahas mengenai analisis kinerja keuangan BLU pada rumah sakit. Salah satunya ialah studi yang dilaksanakan oleh Nurliah *et al.*, (2023) di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Mengacu temuan, kinerja keuangan rumah sakit dari tahun 2015 hingga 2018 cukup memuaskan. Beberapa statistik keuangan, seperti Rasio Lancar (RL), Perputaran Aktiva Tetap (PAT), serta Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional, menggambarkan hal ini

baik. Sementara itu, Imbal Hasil Ekuitas (ROE) juga menunjukkan kondisi yang cukup stabil. Namun, beberapa indikator seperti Rasio Kas, Lama



Penagihan Piutang, serta Imbal Hasil atas Aset Tetap (ROA) tergolong kurang memuaskan hingga tidak baik. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar melakukan perbaikan kinerja keuangan, khususnya dengan mengoptimalkan pengelolaan kas dan aset lancar, serta mempercepat proses penagihan piutang untuk mendukung peningkatan kinerja di masa mendatang.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Reza Ramanda *et al.*, (2023) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan menunjukkan bahwa pada tahun 2018, kinerja keuangan rumah sakit tersebut memperoleh skor total sebesar 8,6, yang termasuk dalam kategori SEDANG dengan predikat BB. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan skor menjadi 10,3, namun masih berada dalam kategori SEDANG dengan predikat yang sama, yaitu BB. Kemudian, di tahun 2020, skor kembali naik menjadi 11,6, yang tetap dalam kategori SEDANG tetapi dengan peningkatan predikat menjadi BBB. Berlandaskan hasil penilaian selama tiga tahun berturut-turut dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018, maka bisa ditetapkan bahwasanya pencapaian kinerja keuangan terbaik dicapai pada tahun 2020.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Setiawati *et al.*, (2024) di RS Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada periode 2016–2020 menunjukkan bahwa skor kinerja keuangan rumah sakit mengalami penurunan secara bertahap setiap tahunnya. Pada tahun 2016, skor berada di angka 96,74 dan menurun menjadi 80,79 pada tahun berikutnya. Tren penurunan ini terus berlanjut dengan skor sebesar 78,45 pada tahun 2018, sedikit meningkat menjadi 80,79 pada 2019, namun kembali



turun ke angka 78,42 pada tahun 2020. Beberapa alasan, beberapa di antaranya bersifat internal ataupun eksternal, berkontribusi terhadap penurunan kinerja keuangan ini. Faktor internal mencakup lemahnya koordinasi antara pihak rumah sakit dan verifikator BPJS dalam proses penagihan piutang, serta tidak adanya subsidi pasien sejak tahun 2018 hingga 2020. Sementara itu, faktor eksternal berhubungan dengan lambatnya proses pembayaran piutang oleh BPJS maupun pihak penjamin lainnya.

Merujuk pada uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap perkembangan kinerja keuangan pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum (BLU) sejak tahun 2016. Sebagai satuan kerja BLU, rumah sakit ini memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan secara fleksibel dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Namun demikian, fleksibilitas tersebut harus tetap dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Adapun pengukuran kinerja keuangan didasarkan oleh Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2016 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Kesehatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 yang di dalamnya membahas Monitoring serta Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum, yang secara khusus menekankan pentingnya evaluasi aspek keuangan sebagai salah satu komponen utama dalam kinerja BLU.



Berdasarkan ketentuan dalam PER-22/PB/2020, Rumah Sakit Bhayangkara memiliki standar skor kinerja keuangan yang berbeda khususnya pada rasio keuangan dibandingkan dengan rumah sakit umum yang juga berstatus sebagai BLU. Perbedaan ini menjadi perspektif baru dalam penelitian karena menunjukkan adanya penyesuaian indikator kinerja keuangan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik kelembagaan dan fungsi pelayanan masing-masing rumah sakit. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan kinerja keuangan Rumah Sakit Bhayangkara Kendari yang sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana standar nasional diimplementasikan secara berbeda di lingkungan instansi vertikal seperti Polri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana perkembangan kinerja keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari apabila diukur menggunakan rasio-rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :



Untuk menganalisis perkembangan kinerja keuangan Badan Layanan Umum pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan menggunakan rasio-rasio

keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai perkembangan kinerja keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada RS Bhayangkara Kendari.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah terkait implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) pada rumah sakit, dengan penekanan pada aspek kinerja keuangan sebagai salah satu faktor utama dalam pengelolaan tersebut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi peneliti sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis terhadap kinerja keuangan pada instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), khususnya rumah sakit. Selain itu, penelitian ini juga menjadi pengalaman empiris dalam menerapkan teori-teori akuntansi sektor publik serta metodologi penelitian secara langsung pada objek penelitian yang relevan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dengan ruang lingkup yang lebih luas maupun

an yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek keuangan dan manajerial lan Layanan Umum.



2. Bagi RS Bhayangkara Kendari

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi manajemen RS Bhayangkara Kendari dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja keuangan rumah sakit sebagai instansi Badan Layanan Umum (BLU). Melalui analisis yang disajikan, pihak rumah sakit dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan serta mengoptimalkan pengelolaan keuangan secara lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil Rumah Sakit Bhayangkara Kendari sebagai objek penelitian, yang telah mengimplementasikan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/KMK.05/2016. Rumah sakit ini termasuk dalam jajaran instansi pemerintah yang telah berstatus BLU dan menyelenggarakan layanan publik dengan sistem pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel. Fokus utama penelitian ini adalah pada variabel kinerja, khususnya kinerja keuangan rumah sakit, guna mengevaluasi sejauh mana efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan setelah penerapan BLU.

1.6 Sistematika Penulisan



Struktur penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, memberikan gambaran yang sistematis dan runtut terhadap keseluruhan isi

1.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA., Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, Bab ini berisi rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Bab ini berisi penjelasan mengenai hasil analisis data yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan Keuangan

Sebagai alat untuk mengevaluasi kesehatan serta kinerja suatu entitas, laporan keuangan memainkan peran krusial dalam profesi akuntan. Laporan keuangan ialah sekumpulan dokumen yang merinci status keuangan serta kinerja suatu entitas, seperti yang dinyatakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2012:5). Para pengguna akan bisa memanfaatkan data yang disajikan dalam laporan ini untuk membuat pilihan-pilihan ekonomi yang terinformasi mengenai status keuangan, hasil operasional, serta arus kas perusahaan.

Menurut Harahap (2015:105) laporan keuangan berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi yang merangkum keseluruhan operasi perusahaan. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan entitas bisa diinformasikan oleh informasi yang terkandung di dalamnya. Menurut Kasmir (2019:7) laporan keuangan mencatat aset, kewajiban, laba, serta arus kas suatu organisasi pada tanggal tertentu dalam suatu periode akuntansi.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut Hery (2015:3) mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses pencatatan dan peringkasan data terkait transaksi bisnis. Sedangkan menurut Mahmudi (2019:2) laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban internal kepada atasan dalam pemerintahan dan sebagai pertanggungjawaban eksternal kepada publik dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dalam mendukung pengambilan keputusan.



Berdasarkan definisi yang telah diuraikan laporan keuangan yaitu ringkasan aktivitas ekonomi dan keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu, Pemangku kepentingan internal serta eksternal perusahaan bisa menggunakan laporan ini sebagai referensi ketika membuat pilihan ekonomi, dikarenakan laporan ini memberikan gambaran umum mengenai kinerja keuangan dan efisiensi manajerial.

2.1.1 Jenis – Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019:28) laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama, antara lain: Neraca (*Balance Sheet*), Laporan Laba Rugi (*Income Statement*), Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*), Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*), serta Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to the Financial Statements*).

1. Neraca (*Balance Sheet*)

Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan aset (aktiva), kewajiban (liabilitas), dan ekuitas perusahaan. Dengan demikian, neraca memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan serta klaim terhadap sumber daya tersebut.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi menyajikan hasil operasional perusahaan selama periode tertentu, biasanya satu tahun. Laporan ini mencakup pendapatan, beban, dan laba atau rugi yang dihasilkan. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.



3. Laporan Perubahan Ekuitas (*Statement of Changes in Equity*)

Laporan ini memperlihatkan bagaimana ekuitas pemilik berubah selama jangka waktu tertentu. Perubahan tersebut bisa terjadi akibat laba atau rugi bersih yang dihasilkan, pembagian dividen, maupun transaksi lainnya yang berdampak terhadap nilai ekuitas.

4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Laporan arus kas memberikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas utama: operasional, investasi, dan pendanaan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan memenuhi kewajiban kasnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (*Notes to the Financial Statements*)

Catatan ini memberikan penjelasan tambahan mengenai pos-pos dalam laporan keuangan utama. Informasi yang disajikan mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan, rincian angka-angka tertentu, dan informasi relevan lainnya yang membantu pengguna dalam memahami laporan keuangan secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PSAP 01 mengatur bahwasanya terdapat tujuh jenis laporan keuangan yang harus disusun sebagai

kuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara dalam satu periode

1. Ketujuh laporan tersebut diantaranya:



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan ini menampilkan data mengenai pendapatan, belanja, surplus atau defisit, serta pembiayaan yang telah direalisasikan selama satu tahun anggaran. Seluruh elemen tersebut dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga memungkinkan untuk menilai sejauh mana kinerja anggaran tercapai dan seberapa efektif pelaksanaannya.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan ini merinci perubahan saldo anggaran lebih dari satu tahun ke tahun berikutnya. Data tersebut bermanfaat untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam mengelola sisa anggaran serta menilai ketepatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan.

3. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Di dalamnya tercermin jumlah aset yang dimiliki, kewajiban yang harus dipenuhi, serta ekuitas yang mencerminkan selisih antara aset dan kewajiban tersebut.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan ini menampilkan gambaran kinerja ekonomi dengan menampilkan sumber daya yang meningkatkan ekuitas serta bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam aktivitas operasional selama suatu periode. Disusun menggunakan basis akrual, laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efisien dan efektif entitas dalam memanfaatkan sumber dayanya.



5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan aliran masuk dan keluar kas serta setara kas selama satu periode akuntansi. Informasi dalam laporan ini mencakup asal sumber kas, penggunaannya, serta saldo kas pada akhir periode, yang berguna untuk menilai likuiditas dan keberlanjutan operasional.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menunjukkan pergerakan ekuitas selama satu periode, baik kenaikan maupun penurunan, yang berasal dari aktivitas operasional maupun koreksi atas laporan sebelumnya. Laporan ini mencerminkan perubahan kekayaan bersih yang dimiliki.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK berfungsi sebagai pelengkap laporan utama dengan memberikan keterangan lebih rinci terhadap pos-pos tertentu. CaLK juga memuat kebijakan akuntansi yang dipakai serta informasi tambahan lain yang dibutuhkan guna memperjelas dan memperkuat pemahaman terhadap keseluruhan isi laporan keuangan.

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan seperti yang dinyatakan oleh Hutaeruk (2017:10) yaitu guna membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan menyediakan informasi mengenai situasi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi

1 suatu entitas. Tujuan dari pembuatan laporan keuangan, menurut Mahmudi ialah guna membantu pengguna mengevaluasi pertanggungjawaban dan



membuat keputusan politik, sosial, serta ekonomi yang lebih baik. Tujuan tersebut dicapai melalui:

1. Memberikan rincian mengenai kondisi sumber daya ekonomi serta pemerataan pemerintah;
2. Mengungkapkan informasi mengenai perubahan ekuitas, kewajiban, serta aset pemerintah;
3. Menyediakan latar belakang penciptaan, distribusi, serta penggunaan aset moneter;
4. Menyediakan bukti mengenai sejauh mana pengeluaran yang direncanakan sudah terpenuhi;
5. Merinci metode yang dipergunakan oleh badan usaha pelapor untuk memenuhi kebutuhan keuangan serta mendanai operasinya;
6. Menggambarkan kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang mendukung penilaian terhadap kapasitas entitas pelaporan dalam membiayai seluruh aktivitas operasionalnya.

2.2 Analisis Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2015:190) analisis laporan keuangan ialah penguraian laporan keuangan ke dalam bagian-bagian penyusunnya guna mendapatkan informasi yang lebih spesifik, serta mencari korelasi yang bermakna antara data numerik serta



Situasi keuangan suatu entitas bisa lebih dipahami dengan penerapan ini, yang ditujukan guna memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih

Sementara itu, Sujarweni (2017:6) mengungkapkan bahwasanya analisis laporan keuangan ialah sebuah proses yang dilakukan untuk meninjau atau mengevaluasi kondisi keuangan suatu perusahaan, termasuk kinerja operasionalnya baik di masa lalu maupun yang diperkirakan di masa depan. Analisis ini bertujuan untuk menilai performa yang telah dicapai serta memperkirakan prospek kinerja di periode yang akan datang. Sedangkan menurut Mahmudi (2019:10) analisis laporan keuangan dilakukan untuk mempermudah pemahaman terhadap isi laporan keuangan, mengartikan angka-angka yang tercantum di dalamnya, melakukan evaluasi atas kinerja keuangan, serta memanfaatkan informasi tersebut sebagai dasar dalam tahapan pengambilan keputusan yang tepat.

Analisis laporan keuangan, seperti yang dijelaskan di atas, ialah metode penelaahan laporan keuangan suatu entitas dengan maksud agar memperoleh wawasan mengenai status keuangannya serta memanfaatkan pengetahuan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Analisis Laporan Keuangan

Tujuan utama dari analisis laporan keuangan ialah guna menentukan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan sudah dikelola. Dan juga analisis ini berfungsi sebagai alat evaluasi bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerjanya serta sebagai dasar perbandingan kinerja keuangan antar periode akuntansi.

Kasmir (2019:68) mengemukakan bahwasanya terdapat beberapa tujuan serta dari analisis laporan keuangan, antara lain:



1. Mencakup perincian aset, kewajiban, modal, serta kinerja perusahaan terkini untuk memberikan gambaran situasi keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu.
2. Mengungkapkan berbagai aspek yang masih menjadi kelemahan dalam operasional perusahaan.
3. Mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan.
4. Berfungsi sebagai batu loncatan dalam pembuatan kebijakan strategis yang relevan dengan keuangan di masa depan.
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja manajerial, guna mengetahui apakah manajemen perlu dipertahankan, ditingkatkan, atau diganti.
6. Dimaksudkan agar dipakai sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan pencapaian maksud perusahaan yang sudah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2019:12) analisis laporan keuangan bermanfaat dalam menilai tingkat efisiensi, efektivitas, dan aspek ekonomi dari pelaksanaan program, aktivitas, atau fungsi dalam pemerintahan. Selain itu, analisis ini juga berguna untuk mengukur pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu kegiatan terhadap tujuan yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi sejauh mana keadilan dan pemerataan (*equity dan equality*) tercermin dalam pelaksanaan program pemerintah.

2.3 Kinerja Keuangan BLU – Rumah Sakit



ah sakit membutuhkan suatu instrumen guna mengukur kinerja keuangan
ayanan yang diberikan. Evaluasi kinerja bertujuan untuk menilai sejauh mana
an tujuan rumah sakit sebagai penyedia layanan publik serta memastikan

apakah penggunaan sumber dana daerah telah berjalan sesuai harapan (Ensslin *et al.*, 2022). Oleh karenanya, diperlukan suatu pedoman yang bisa dijadikan rujukan guna mengukur dan menilai kinerja rumah sakit secara sistematis dan objektif.

Berlandaskan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020 mengenai Pedoman penilaian Kinerja Badan Layanan Umum pada sektor layanan kesehatan, penilaian kinerja BLU dilaksanakan guna menilai sejauh mana keberhasilan BLU dalam memberikan layanan publik. Penilaian ini dilaksanakan secara tahunan serta mencakup dua dimensi utama, yaitu aspek pelayanan dan aspek keuangan. Aspek keuangan dinilai melalui analisa atas laporan keuangan BLU serta ketaatannya terhadap peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan BLU. Penilaian kinerja keuangan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai rasio keuangan. Rasio-rasio tersebut sangat erat kaitannya dengan performa rumah sakit, karena kondisi dan kinerja finansial rumah sakit dapat ditelusuri melalui perbandingan data kuantitatif yang tercantum dalam laporan keuangan.

2.4 Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio ialah metode yang umum dipakai ketika mengevaluasi dan menganalisis laporan keuangan suatu entitas. Rasio keuangan pada dasarnya tidak memiliki makna yang kuat jika berdiri sendiri, sehingga perlu dibandingkan dengan rasio lainnya agar hasil analisis menjadi lebih komprehensif. Rasio keuangan

dari membandingkan dua komponen utama serta relevan dari laporan keuangan, seperti yang dinyatakan oleh Harahap (2015: 297).



Menurut Samryn (2015:363) analisis rasio keuangan adalah metode yang menjadikan data keuangan suatu entitas lebih bermakna melalui proses perbandingan. Sementara itu, Mahmudi (2019:90) menyatakan bahwa analisis rasio keuangan merupakan suatu metode yang membandingkan dua data angka yang bersumber dari elemen-elemen dalam laporan keuangan. Teknik ini digunakan untuk menilai perkembangan kinerja suatu entitas dari waktu ke waktu serta untuk membandingkannya dengan kinerja entitas lain yang memiliki karakteristik serupa. Jenis-jenis rasio keuangan yang umum digunakan meliputi: analisis aset, analisis likuiditas, analisis solvabilitas, analisis kewajiban (*leverage*), analisis ekuitas, analisis profitabilitas, dan analisis aktivitas.

2.4.1 Rasio Keuangan sebagai Alat Analisis Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum – Rumah Sakit

Berdasarkan ketentuan dalam PMK No. 129/PMK.05/2020 mengenai Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, kinerja keuangan dapat dianalisis melalui beberapa indikator, antara lain kemampuan BLU dalam menghasilkan pendapatan dari layanan yang diberikan (rentabilitas), kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas), kemampuan melunasi seluruh utang (solvabilitas), beserta sejauh mana pendapatan dari layanan mampu menutupi biaya operasional. Penilaian ini juga sejalan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja BLU di Bidang Pelayanan Kesehatan, yang menegaskan pentingnya penggunaan rasio keuangan sebagai instrumen untuk r kinerja keuangan berdasarkan analisis laporan keuangan BLU, khususnya



di rumah sakit. Rasio keuangan tersebut digunakan untuk menilai sejumlah aspek penting dalam kinerja keuangan, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Rasio kas (*cash ratio*) berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan kas dan setara kas dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Kas yang dimaksud merujuk pada dana tunai atau saldo bank yang siap digunakan kapan saja, tidak termasuk dana pada rekening dana kelolaan (seperti Jamkesda atau BPJS) yang belum menjadi hak BLU. Setara kas mencakup aset yang sangat likuid dan dapat diubah menjadi kas dalam waktu 1 hingga 3 bulan tanpa risiko perubahan nilai yang signifikan, sementara kewajiban jangka pendek adalah utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
2. Rasio lancar (*current ratio*) digunakan untuk menilai kecukupan aset lancar dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Aset lancar mencakup elemen seperti kas, setara kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar di muka yang diharapkan akan terealisasi dalam jangka waktu satu tahun. Saldo bank yang belum menjadi hak BLU, seperti yang terdapat dalam rekening dana kelolaan, tidak termasuk dalam perhitungan.
3. Periode penagihan piutang (*collecting period*) mengukur kecepatan BLU dalam menagih piutang dari pendapatan operasional tahunan. Piutang usaha berasal dari penyerahan jasa atau barang dalam kegiatan operasional, sedangkan pendapatan usaha mencakup penerimaan BLU atas layanan kepada masyarakat.
4. Perputaran aset tetap (*fixed asset turnover*) menghitung efektivitas pemanfaatan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan operasional.



Pendapatan ini berasal dari layanan kepada masyarakat serta pendapatan lain yang tidak terkait langsung dengan APBN/APBD, sementara aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

5. Imbal hasil atas aset tetap (*return on fixed asset*) menilai seberapa besar surplus atau defisit yang dihasilkan terhadap nilai aset tetap. Surplus/defisit diperhitungkan sebelum item keuntungan atau kerugian lainnya serta tanpa memasukkan pendapatan dari investasi APBN/APBD dan beban penyusutan.
6. Imbal hasil ekuitas (*return on equity*) menunjukkan efisiensi penggunaan ekuitas dalam menghasilkan surplus atau defisit, dihitung dari selisih surplus/defisit (dengan pengecualian pos-pos tertentu) terhadap ekuitas yang disesuaikan.
7. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional menunjukkan berapa besar biaya operasional yang dapat ditutup oleh pendapatan PNBPN. Pendapatan PNBPN merupakan penerimaan yang diperoleh BLU sebagai balasan atas penyediaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat. Pendapatan ini mencakup hibah, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, pendapatan dari sewa, layanan melalui lembaga keuangan, serta pendapatan lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan layanan utama BLU. Namun, pendapatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak termasuk dalam kategori ini. Biaya operasional adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Komponen biaya ini meliputi belanja pegawai dan belanja barang, yang pendanaannya berasal dari APBN maupun dari pendapatan PNBPN BLU.



Namun demikian, biaya penyusutan tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya operasional.

Sedangkan Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk menilai kondisi keuangan rumah sakit, yang pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum di Bidang Pelayanan Kesehatan. Penilaian ini mengacu pada tata cara perhitungan kinerja BLU rumah sakit. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa evaluasi kinerja keuangan Satuan Kerja BLU bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan satker BLU. Salah satu tolok ukurnya adalah melalui analisis rasio-rasio keuangan. Adapun langkah-langkah penilaian kinerja keuangan satker BLU bidang kesehatan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Skor Penilaian Kinerja pada Aspek Keuangan dengan Rasio Keuangan

No	Aspek Keuangan (Rasio Keuangan)	Skor
1	Rasio Kas (<i>Cash Ratio</i>)	2
2	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	4
3	Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	3
4	Perputaran Aset Tetap (<i>Fixed Asset Turnover</i>)	2
5	Imbalan atas Aset Tetap (<i>Return on Fixed Asset</i>)	2
6	Imbalan ekuitas (<i>Return on Equity</i>)	2
7	Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional	4
Skor Paling Tinggi		19

Sumber: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Pelayanan Kesehatan.



alui penggunaan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020, kinerja keuangan suatu

BLU dapat dievaluasi dan diklasifikasikan ke dalam kategori BAIK, SEDANG, atau BURUK sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9. Proses penilaian dilakukan dengan menggunakan metode skoring, yang hasilnya kemudian digunakan untuk menentukan kategori kinerja keuangan berdasarkan skor yang diperoleh. Untuk menghitung skor tersebut, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kinerja Keuangan} = \frac{\text{Skor Kinerja}}{\text{Total Skor Maksimum}} \times 100$$

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 9 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2020, hasil evaluasi atas kinerja dikelompokkan ke dalam beberapa kategori penilaian sebagai berikut:

a. BAIK, terdiri dari:

AAA, apabila total skor (TS) > 95;

AA, apabila total skor $80 < TS \leq 95$; dan

A, apabila total skor $68 < TS \leq 80$.

b. SEDANG, terdiri dari:

BBB, apabila total skor $56 < TS \leq 68$;

BB, apabila total skor $45 < TS \leq 56$; dan

B, apabila total skor $35 < TS \leq 45$.

c. BURUK, terdiri dari:

CC, apabila total skor $15 \leq TS \leq 35$; dan

D, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).



2.5 Badan Layanan Umum

Satuan kerja merupakan bagian dari struktur organisasi pemerintahan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU), asalkan telah memenuhi kriteria administratif, teknis, dan substantif selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status ini merupakan langkah strategis dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik di Indonesia. Kehadiran BLU menjadi perwujudan nyata dari komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Merujuk Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah yang menerima dana untuk menyediakan barang dan jasa yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Fokus utama dari BLU adalah mendorong peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dengan demikian, diharapkan layanan yang diberikan mampu menjawab harapan masyarakat secara maksimal, namun tetap menjaga prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas..

2.5.1 Tujuan dan Asas Badan Layanan Umum

Didirikan dengan sasaran utama guna meningkatkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa, BLU berlandaskan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2 yang mengatur tentang keuangan badan layanan umum. Tujuan tersebut dicapai melalui



pemberian keleluasaan dalam pengelolaan aspek keuangan kepada BLU, yang dijalankan berdasarkan prinsip efisiensi ekonomi, peningkatan produktivitas, serta praktik manajerial yang profesional dan berorientasi pada kelayakan usaha.

Adapun asas penyelenggaraan BLU merujuk pada ketentuan Pasal 3 dalam PP Nomor 74 Tahun 2012 diantaranya :

1. Badan Layanan Umum (BLU) menjalankan operasionalnya sebagai bagian dari unit kerja dalam lingkup kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, yang memperoleh mandat untuk menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh instansi pembina.
2. Sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari sistem birokrasi pemerintahan, BLU tidak memiliki status hukum tersendiri dan tetap berada di bawah naungan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah tempat BLU tersebut beroperasi.
3. Tanggung jawab atas pelaksanaan layanan publik oleh BLU, termasuk manfaat yang dinikmati masyarakat, berada di bawah kewenangan pejabat pembina seperti menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, atau walikota yang memberikan pelimpahan wewenang tersebut.
4. Pengelolaan operasional BLU berada di bawah tanggung jawab pejabat yang ditunjuk, yang bertugas melaksanakan kegiatan layanan publik sesuai dengan kewenangan yang diterimanya dari pimpinan instansi terkait.

Kegiatan yang dijalankan oleh BLU bersifat non-profit, di mana pencapaian keuntungan bukan menjadi orientasi utama dalam operasionalnya.



6. Dokumen perencanaan dan pelaporan, yang mencakup rencana kerja, anggaran, serta laporan kinerja serta keuangan BLU, wajib disusun secara terintegrasi sebagai bagian yang menyatu dengan sistem pelaporan instansi induk.
7. Dalam pengelolaan pelayanan publik, BLU diharuskan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional dan mengacu pada praktik bisnis yang sehat, guna menjamin kelangsungan operasional serta kualitas layanan yang diberikan.

2.5.2 Karakteristik Badan Layanan Umum

Pemerintah menetapkan PP Nomor 74 Tahun 2012 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebelum regulasi ini diberlakukan, belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur unit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, yang kala itu memiliki wujud dan model yang beragam. Unit yang kini dikenal sebagai Badan Layanan Umum (BLU) mempunyai sejumlah karakteristik khusus yang membedakannya dari unit kerja pemerintahan lainnya, antara lain:

1. BLU berfokus pada penyediaan barang dan jasa yang secara langsung ditujukan bagi kepentingan masyarakat.
2. Dalam pengelolaannya, BLU menerapkan prinsip bisnis yang sehat namun tidak berorientasi pada profit. Seluruh pendapatan yang diperoleh dimanfaatkan sepenuhnya untuk peningkatan mutu layanan.



3. BLU beroperasi dengan mengedepankan efisiensi dan produktivitas. Penyerapan anggaran bukan merupakan tujuan utama karena kelebihan anggaran (surplus) dapat diterapkan untuk pengembangan pelayanan di tahun berikutnya.
4. Terdapat banyak kelonggaran dalam mekanisme pengelolaan keuangan serta sumber daya manusia yang diterapkan oleh BLU. Selain itu, tidak ada mandat bahwasanya surplus ataupun pendapatan harus disetor ke kas negara.
5. BLU juga memperoleh pengecualian terhadap beberapa ketentuan umum yang berlaku bagi unit pemerintahan lainnya.

2.5.3 Laporan Keuangan Badan Layanan Umum

Siklus akuntansi yang diterapkan oleh Badan Layanan Umum (BLU), termasuk dalam hal penyajian data serta informasi keuangan, wajib mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan ini selaras dengan apa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020, yang menjadi acuan utama dalam penyusunan laporan keuangan BLU. Tujuan diberlakukannya regulasi ini adalah untuk meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, baik jika dikaitkan dengan perencanaan anggaran, periode pelaporan, maupun antar berbagai unit BLU itu sendiri.

Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang wajib di buat oleh BLU berdasarkan pasal 171 PMK Nomor 129/PMK.05/2020 meliputi:



in Realisasi Anggaran (LRA)

in Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

- c. Neraca
- d. Laporan Operasional (LO)
- e. Laporan Arus Kas (LAK)
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan keuangan BLU menyajikan gambaran mengenai posisi aset ekonomi serta liabilitas yang dimiliki oleh entitas BLU di akhir periode pelaporan, serta informasi mengenai arus masuk serta keluar aset ekonomi dalam kurun waktu tersebut. Informasi ini sangat krusial bagi para pemangku kepentingan untuk menilai kemampuan BLU dalam menjaga keberlanjutan operasionalnya di masa mendatang. Selanjutnya, laporan ini akan diaudit oleh auditor eksternal pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Murdianti Middin (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Setelah Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Pada Rsud Batara Siang Kabupaten	Kinerja Keuangan Rsud Batara Siang Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan	Temuan studi memperlihatkan bahwasanya setelah diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, kinerja keuangan RSUD Batara Siang selama periode 2017–2019 mengalami variasi. Skor tertinggi tercatat pada tahun 2017, namun secara keseluruhan selama tiga tahun tersebut, kinerja rumah sakit tetap berada dalam kategori “sedang”, dengan predikat BBB di tahun 2017, dan B pada tahun 2018 serta 2019. Ini mengindikasikan bahwa



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pangkajene Dan Kepulauan		walaupun terdapat perbedaan skor, klasifikasi kinerja keuangan rumah sakit tetap konsisten dalam kategori yang sama.
2	Nabella, Sulistiadi & Wahyu (2023)	Kinerja Rumah Sakit Dengan Pendekatan Balanced Scorecard (BSC): Studi Kasus	Kinerja Rumah Sakit, Balanced Scorecard (BSC)	Hasil yang didapatkan bahwa kurangnya efisiensi anggaran di RSUD yang ada, tidak terealisasikannya anggaran yang sudah direncanakan, akuisisi pelanggan yang tidak meningkat menyebabkan pelanggan baru tidak terjadi peningkatan secara signifikan, tidak tercapainya beberapa indikator rumah sakit dan kurangnya produktivitas karyawan RSUD.
3	Mutiara Amalia Widia Putri (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Rumah Sakit yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Saat Adanya Pandemi COVID-19	Kinerja Keuangan, Covid-19	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan tujuh rumah sakit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum dan saat adanya pandemi COVID-19 beragam tergantung sudut pandang rasio keuangan yang dilihat. Secara keseluruhan, RSUD Royal Prima dan Metro Healthcare Indonesia merupakan rumah sakit yang memiliki perubahan kinerja keuangan paling baik saat adanya pandemi COVID-19 dan secara umum ketujuh rumah sakit melakukan dua bentuk strategi yang meliputi cost leadership dan differentiation.
	olisah, hmudah &	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai	Rasio Keuangan,	Analisis rasio likuiditas dan solvabilitas menunjukkan kinerja keuangan rumah sakit yang baik



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Susenohaji (2023)	Kinerja Keuangan Rumah Sakit Universitas	Kinerja Keuangan	karena berada di atas atau di bawah rata-rata industri. Namun, rasio time interest earned yang negatif mengindikasikan ketidakmampuan rumah sakit membayar bunga utangnya. Sementara itu, analisis aktivitas dan profitabilitas menunjukkan hasil yang kurang baik, dengan profitabilitas rata-rata bernilai negatif, menandakan rendahnya kemampuan menghasilkan laba.
5	Cut Muftia Keumala, <i>et al</i> (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara	Kinerja Keuangan pada RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara	Temuan studi memperlihatkan bahwasanya rasio profitabilitas, likuiditas, dan aktivitas berubah secara signifikan antara sebelum serta sesudah implementasi PPK-BLUD. Namun demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam hal rasio solvabilitas.
6	Ari Ardiansyah (2023)	Analisis Kinerja Keuangan Setelah Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)	Kinerja Keuangan Puskesmas Melata	Berdasarkan hasil penelitian, kinerja keuangan Puskesmas Melata pada tahun 2020 dan 2021 termasuk dalam klasifikasi “baik”, yang mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan umum BLU di bidang kesehatan telah berjalan dengan baik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan skor sehingga kinerjanya diklasifikasikan dalam kategori sedang, yang berarti mutu dan manfaat pelayanan masih berada pada tingkat menengah — tidak baik, namun juga tidak buruk.
	manda, <i>et al</i> (2023)	Analisis Laporan	Laporan Keuangan,	Dengan mengacu pada kriteria yang telah digariskan dalam



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Keuangan Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Teluk Kuantan	Kinerja Keuangan	Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018, penelitian ini melakukan penilaian kinerja keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Teluk Kuantan pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Penilaian dilaksanakan dengan mengumpulkan skor agregat dari seluruh rasio keuangan yang dihitung. Pada tahun 2018 dan 2019, kinerja keuangan RSUD Teluk Kuantan masuk dalam kategori "Sedang" dengan predikat BB, sesuai dengan hasil temuan. Namun pada tahun 2020 meningkat menjadi kategori "Sedang" dengan predikat BBB. Oleh karena itu, dari ketiga periode laporan keuangan yang dianalisis, tahun 2020 merupakan periode dengan kinerja keuangan terbaik.
8	Rochmad Munandar (2024)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Satker Sebelum Badan Layanan Umum (Blu) Dan Satker Setelah Menjadi Blu Layanan Pendidikan Pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Kinerja Keuangan Blu Layanan Pendidikan Pada Kementerian Kesehatan	Hasil penelitian ini juga mengungkapkan adanya perbedaan yang signifikan pada seluruh variabel yang dikaji, yaitu Current Ratio (CR), Rasio Optimalisasi Kas (ROK), Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO), Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), serta Rasio Tingkat Kemandirian (RTK), antara satuan kerja yang belum berstatus Badan Layanan Umum dengan yang telah menerapkan status BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
	neke ierly	Analisis Kinerja Keuangan	Kinerja Keuangan	Hasil analisa statistik memberikan nilai Asymp Sig =



No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Frycillia Widodo, <i>et al</i> (2022)	RSUD Simpang Lima Gumul Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD	RSUD Simpang Lima Gumul	0.010, yang lebih kecil daripada tingkat signifikansinya 0.05. Hal ini membuktikan bahwasanya kinerja keuangan Rumah Sakit SLG berbeda secara substansial sebelum dan sesudah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) diterapkan.
10	Evi Setiawati, <i>et al</i> (2024)	Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada RS Paru Dr M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor Periode 2016 - 2020	Rasio Keuangan, Kinerja Keuangan`	Hasil Penelitian menunjukkan pada tahun 2016, total skor rasio keuangan menunjukkan angka 17,5 dengan kriteria baik. Untuk tahun 2017, total skor rasio keuangan adalah 17 dengan kriteria baik, begitu pula pada tahun 2018 yang memperoleh kriteria baik dengan skor 13,1 dan pada tahun 2019 dengan skor 13,3 juga termasuk dalam kriteria baik. Sementara itu, pada tahun 2020 menunjukkan kriteria sedang dengan skor 12,85.

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2025

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif, di mana data yang diperoleh berbentuk numerik dan dianalisis secara statistik guna memperoleh pemahaman terhadap informasi yang ingin diketahui. Menurut Riduwan (2018:25) kerangka pemikiran adalah suatu pola pikir yang berisi uraian teoretis dan hubungan antar konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Kerangka ini penting karena menunjukkan keterkaitan antara teori dan konsep yang relevan penelitian, sekaligus berfungsi sebagai panduan dalam menyusun penelitian sistematis.



Analisis Perkembangan kinerja keuangan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan laporan keuangan RS Bhayangkara Kendari dengan menggunakan pengukuran rasio-rasio keuangan yang mencakup tujuh dimensi penilaian. Penilaian ini didasarkan pada ketentuan yang tertuang dalam PER-22/PB/2020 mengenai Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum di sektor pelayanan kesehatan, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mana efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan telah tercapai. Terdapat tujuh jenis rasio keuangan yang dijadikan indikator dalam proses penilaian yaitu rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran aset tetap, imbal hasil atas aset tetap, imbal hasil ekuitas, serta rasio pendapatan PNBK terhadap biaya operasional.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

